



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



One on One Quickwins DJPb 2021

Transformasi Kelembagaan | Pasti Lebih Baik

HANDAL
Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal

Matriks Capaian Quickwins DJPB

No	QW	UIC	NOV	NOV	TARGET & PENYELESAIAN	KET*
1	Implementasi <i>FRESH Office</i> DJPb	Setditjen	84,53%	100%	Des-Des	ND-5321/PB.1/2021 31 Desember 2021-
2	Digitalisasi Modul MP PNPB tidak Terpusat	Dit. PA & SITP	100%	100%	Sep-Sep	ND-877/PB.2/2021 8 Okt 2021
3	Digitalisasi Sistem Pembayaran Pemerintah	Dit. PKN & SITP	100%	100%	Des-Nov	ND-2066/PB.3/2021 10 Des 2021
4	Digitalisasi Pembiayaan UMi	Dit. SMI	96%	100%	Des-Des	ND-38/PB.4/2021 10 Jan 2022
5	<i>Go Live</i> Investasi Pemerintah (Tahap I)	Dit. SMI	85,2%	100%	Des-Des	ND-38/PB.4/2021 10 Jan 2022
6	BLU <i>Maturity Rating Assessment</i>	Dit. PPK BLU	100%	100%	Nov-Sep	ND-634/PB.5/PB.51/2021 11 Okt 2021
7	BIOS <i>NextGen: Maturity Rating</i> BLU	Dit. PPK BLU	95%	100%	Des-Des	ND-851/PB.5/2021 30 Desember 2021-
8	Otomatisasi Telaah Laporan Keuangan	Dit. APK & SITP	100%	100%	Nov-Nov	ND-1217/PB.6/121/2021 13 Des 2021
9	<i>Electronic Bank Guarantee</i> (e-BG)	Dit. SP & SITP	84%	100%	Des-Des	ND-2224/PB.7/2021 29 Desember 2021-
10	Rancangan <i>Treasury Big Data</i>	Dit. SITP	100%	100%	Nov-Nov	ND-1880/PB.8/2021 27 Desember 2021-

*Nota Dinas pemenuhan *acceptance criteria*

Highlights Capaian Quickwins DJPB

s.d. 30 November 2021



Implementasi FRESH Office DJPb



Pengertian

Merupakan bentuk awal penahapan implementasi *Activity Based Workplace* (ABW) pada Kantor Pusat dan Instansi Vertikal DJPb, dengan konsep *Flexible, Responsive, Smart* dan *Healthy* (FRESH).



Tujuan

- Mengimplementasikan konsep baru pelaksanaan pekerjaan sesuai *New Ways of Working* (NWOW)
- Menciptakan gedung dan ruang kerja yang *Flexible, Responsive, Smart* dan *Healthy* (FRESH)
- Meningkatkan kenyamanan pegawai & pengguna layanan



Acceptance Criteria

- Terciptanya buku pedoman standardisasi sarana dan prasarana *Fresh Office* DJPb
- Tersedianya alokasi dana implementasi *Fresh Office* DJPb
- Peningkatan pemahaman dan kapasitas pegawai sesuai konsep *New Ways of Working* (NWOW)



Dampak/ Stakeholder

Unit kerja di lingkup DJPb, Satuan Kerja/Mitra Kerja, Unit Eselon I lain di Kemenkeu merasakan peningkatan kenyamanan dalam bekerja dan mendapatkan layanan



Keterkaitan IS/IKU

IS #1 "Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan: *New Ways of Working*"



Unit in Charge

Bagian OTL, Bagian Keuangan, Bagian Umum, Bagian SDM dan Bagian KI; Setditjen



Implementasi FRESH Office DJPb

Keterangan:

-

Tantangan dan Kendala

-

Tindak Lanjut

-

100 %



FRESH OFFICE



Kegiatan	Target	Progres	Bobot
Penetapan surat/keputusan unit piloting ABW	Januari	100%	5%
Penyusunan Buku Pedoman Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor Vertikal dan Penyusunan Ketentuan terkait pola kerja berdasarkan ABW	Jan – Mar	100%	15%
Pengalokasian anggaran dana untuk implementasi Fresh Office pada DIIPA unit kerja piloting	Mar – Mei	100%	20%
Pelaksanaan survey kesiapan pola kerja ABW	Mar – Okt	100%	10%
Peningkatan pemahaman pegawai atas konsep ABW dan perubahan mind set dan budaya kerja pegawai sesuai NTOW	Feb – Sep	100%	15%
Pelaksanaan rehabilitasi/renovasi fisik bangunan gedung/ruangan piloting dan penyediaan peralatan dan mesin untuk piloting ABW	Mei – Okt	100%	20%
Launching Fresh Office DJPb	Nov – Des	100%	15%

Digitalisasi Modul MP PNBPN tidak Terpusat

Pengertian

Merupakan simplifikasi proses bisnis pelaksanaan anggaran belanja yang bersumber dari dana PNBPN Tersebar (tidak Terpusat) yang dikelola secara langsung oleh Satker Pengguna PNBPN mulai dari proses rekonsiliasi/konfirmasi rekapitulasi setoran PNBPN sampai dengan proses perhitungan MP PNBPN

Acceptance Criteria

- Penerbitan Peraturan terkait Modul MP PNBPN tidak Terpusat
- Penyelesaian Modul MP PNBPN tidak Terpusat
- Implementasi Modul MP PNBPN tidak Terpusat

Tujuan

- Mewujudkan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja PNBPN yang efisien dan efektif
- *Time & cost saving* melalui simplifikasi proses bisnis administrasi pengajuan dan persetujuan
- Mengurangi penumpukan beban pekerjaan pada akhir tahun anggaran
- Meningkatkan kualitas pelayanan Satker pengelola PNBPN kepada masyarakat

Keterkaitan IS/IKU

IS #17 "Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital"

Dampak/Stakeholder

Seluruh satker K/L secara nasional

Unit in Charge

Direktorat PA dan Direktorat SITP (*Joint QW*)



Digitalisasi Modul MP PNBPN tidak Terpusat

Dit. PA (100%)

Kegiatan	Target	Progres	Bobot
Pembentukan Tim dan Pengajuan user requirement	Jan – Feb	100%	10%
Pembahasan draf Peraturan Modul MP PNBPN Tidak Terpusat	Mar – Jun	100%	20%
Pembangunan Modul MP PNBPN Tidak Terpusat			
• Perancangan desain analisis sistem/Modul	Juli	100%	5%
• Interkoneksi dengan SPAN	Jul	100%	5%
• Developing sistem program aplikasi termasuk pengembangan di SAS	Agustus	100%	25%
• Ujicoba dan penyempurnaan sistem (UAT Modul MP PNBPN)	Agustus	100%	5%
• Finalisasi Modul MP PNBPN	September	100%	5%
Sosialisasi Modul MP PNBPN Tidak Terpusat	September	100%	20%
Launching Implementasi Modul MP PNBPN Tidak Terpusat	September	100%	5%



CAPAIAN

100%

Dit. SITP (100%)

No.	Timeline Kegiatan	Target 2021	Progress	Bobot
1.	Analisa dan perancangan berdasarkan User Requirement yang disampaikan PA	Februari - Maret	100%	20%
2.	Pengembangan Modul MP PNBPN tidak terpusat	Maret - Agustus	100%	30%
3.	Pengujian Modul MP PNBPN tidak terpusat (SIT dan UAT)	Agustus	100%	25%
4.	Deployment Modul MP PNBPN tidak terpusat	September	100%	25%

Digitalisasi Modul MP PNBP tidak Terpusat

Dit. PA



KETERANGAN

Capaian Quickwins 2021 s.d. Minggu II September 2021 telah mencapai 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembentukan Tim Digitalisasi Modul MP PNBP Tidak Terpusat berdasarkan SK Direktur PA No.KEP-5/PB.2/2021 dan permintaan UR ke SITP melalui ND-155/PB.2/2021
- Desain Modul MP PNBP telah selesai dan telah terkoneksi dengan SPAN (MPN G3).
- Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan MP PNBP secara Elektronik telah terbit tanggal 8 September 2021 dan sistem telah selesai dibangun dan siap diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait.
- Tanggal 9 September 2021 telah dilakukan sosialisasi PMK Nomor 110/PMK.05/2021 dan Perdirjen PER-8/PB/2021 tahap I.
- Tanggal 16 September 2021 telah dilakukan sosialisasi tahap II sekaligus launching implementasi Modul MP PNBP.
- Penetapan MP PNBP pada beberapa K/L telah berhasil dilakukan menggunakan Modul MP PNBP

TANTANGAN DAN KENDALA

Penentuan skema Proses Bisnis MP PNBP, perlu mempertimbangkan banyak aspek, seperti: simplifikasi mekanisme, beban kerja satker dan Kanwil, waktu proses, waktu pengembangan sistem, keamanan/pengendalian dan dokumen pendukung.

TINDAK LANJUT

- Memberikan bimbingan implementasi Modul MP PNBP terhadap Kanwil, K/L, dan satker
- Berkoordinasi dengan Dit. SITP untuk dalam hal evaluasi implementasi Modul MP PNBP

Digitalisasi Modul MP PNPB tidak Terpusat

Dit. SITP



KETERANGAN

Februari 2021:

Telah diajukan user requirement

Maret 2021:

- Analisa dan perancangan User Requirement
- Pengembangan Modul MP PNPB Tidak terpusat

April 2021:
Progres pengembangan aplikasi sudah 80%, ditargetkan akhir bulan mei ini sudah 100% dan akan dilanjutkan dengan proses SIT dan UAT

Mei 2021 :

Proses pengembangan sudah mencapai 95%

Juni :

Dilakukan penyesuaian timeline capaian Sesuai ND Direktur PA NO : ND-595/PB.2/2021

Juli :

Terdapat perubahan capaian progress pengembangan MP PNPB karena terdapat perubahan user requirement

Agustus :

Proses pengembangan, pengujian dan depolyment sudah selesai dilakukan.

TANTANGAN DAN KENDALA

Perubahan User requirement sesuai rancangan Perdirjen MP PNPB tidak terpusat

TINDAK LANJUT

Penyesuaian pengembangan dengan User requirement yang baru

Digitalisasi Sistem Pembayaran Pemerintah

Pengertian

Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara yang efektif merupakan implementasi digitalisasi pengelolaan rekening pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga, serta pelaksanaan digitalisasi sistem pembayaran penerimaan dan digitalisasi sistem pembayaran pengeluaran negara

Tujuan

- Menciptakan ekosistem yang mengintegrasikan Satker K/L, Penyedia Barang/Jasa (UMKM), Perbankan dan Kuasa BUN dalam proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Uang Persediaan
- Mendukung penerapan *shared service* dan *schedule payment date*
- Mengatur pengurangan jumlah rekening pemerintah dalam bentuk giro
- Mengatur pembangunan sistem *monitoring* rekening yang berbasis elektronik dan *realtime*

Dampak/Stakeholder

K/L, Pemda, KPPN, Perbankan, Vendor/Rekanan Pengadaan Barang/Jasa (UMKM)

Acceptance Criteria

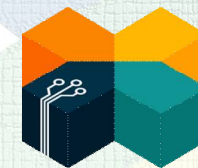
- Pengelolaan rekening tunggal K/L termonitor pada *dashboard* bank
- Satker K/L dan UMKM telah mengimplementasikan Sistem Digital *Payment-Marketplace* yang dibiayai dengan UP
- Bank Persepsi peserta telah *go live* kanal 7020 (SP2D *Online*)
- Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) peserta telah *go live* kanal penerimaan negara

Keterkaitan IS/IKU

- IS #17 "Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital"
- Mendukung IKU Kemenkeu *Wide*: Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara

Unit in Charge

Direktorat PKN dan Direktorat SITP (*Joint QW*)



DIGITALISASI
sistem
pembayaran
pemerintah

Digitalisasi Sistem Pembayaran Pemerintah

Dit. PKN (100%)

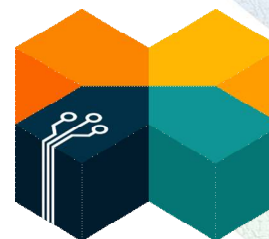
Kegiatan	Target	Progr es	Bobot
Penyampaian Surat Komitmen dan penyesuaian rencana aksi pencapaian target Go Live SP2D Online dari bank persepsi	Januari	100%	5%
Sosialisasi/Bimtek aplikasi DigiPay pada Satker Setditjen lingkup Kemenkeu	Jan – Feb	100%	9%
Implementasi aplikasi DigiPay pada Satker Kemenkeu	Feb – Mar	100%	5%
Monitoring dan evaluasi tahapan e-billing/SIT/UAT SP2D Online pada bank persepsi	Feb – Mar	100%	5%
Monitoring dan evaluasi tahapan SIT/UAT kanal penerimaan negara pada Lembaga Persepsi Lainnya (LPL)	Feb – Des	100%	5%
Penyelesaian Landing Page aplikasi DigiPay	Juni	100%	10%
Monitoring data rekening pengeluaran K/L yang telah diajukan migrasi saldo	Okt	100%	5%
Monitoring data rekening pengeluaran K/L yang telah termonitor pada dashboard bank	Okt	100%	5%
Sosialisasi/Bimtek aplikasi DigiPay pada K/L kecil dan K/L besar terpilih	April	100%	8%
Implementasi aplikasi DigiPay pada K/L kecil dan K/L besar terpilih	Apr – Jun	100%	10%
Konsolidasi rekening pengeluaran yang telah migrasi saldo pada aplikasi SPRINT	November	100%	5%
Monitoring dan evaluasi implementasi aplikasi DigiPay pada Satker Kemenkeu, K/L kecil, dan K/L besar terpilih	Juni	100%	5%
Sosialisasi/Bimtek aplikasi DigiPay pada Satker pusat seluruh K/L	Jul – Okt	100%	8%
Implementasi Aplikasi DigiPay pada seluruh K/L	Jul – Nov	100%	10%
Monitoring dan evaluasi implementasi aplikasi DigiPay pada seluruh K/L	Desember	100%	5%

Dit. SITP (100%)

No.	Timeline Kegiatan	Target 2021	Progress	Bobot
1.	Analisa dan perancangan berdasarkan User Requirement yang disampaikan PKN	Februari	100%	25%
2.	Pengembangan Landing Page DigiPay (SITP & Himbara)	Maret	100%	25%
3.	Pengujian Landing Page DigiPay (SIT dan UAT) SITP dan Himbara	Mei	100%	25%
4.	Deployment Landing Page DigiPay SITP dan Himbara	Juli	100%	25%

CAPAIAN

100%



DIGITALISASI
sistem
pembayaran
pemerintah

Digitalisasi Sistem Pembayaran Pemerintah

Dit. PKN

KETERANGAN

- Implementasi Digipay telah dilakukan oleh 4.538 satker dari 76 K/L dan 830 vendor serta terdapat 9.819 transaksi senilai Rp22,64. Khusus internal Kemenkeu, dari 855 satker yang memiliki rekening himbara, 828 satker telah bergabung sehingga capaiannya adalah 96,84%.
- Hingga 30 November 2021, kanal bayar Fintech/e-Commerce/Lembaga lainnya yang telah live sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) sebanyak 9 dari target 9 LPL (100%), terdiri dari: Tokopedia, Bukalapak, Finnet, Mitra Pajakku, Online Pajak, Indomaret, Dana, Bms dan Nebula.
- Proses restrukturisasi rekening pengeluaran dilakukan melalui tahapan pengajuan rekening induk, pengajuan rekening satker serta proses migrasi saldo dari rekening giro ke rekening virtual. Sesuai nota dinas Direktur PKN nomor ND-1014/PB.3/2021, restrukturisasi rekening pengeluaran telah dilaksanakan pada seluruh K/L.
- Dalam hal perekaman rekening VA pada aplikasi SPRINT, Direktur PKN telah mengirimkan surat kepada Kepala Biro Keuangan K/L nomor S-1088/PB.3/2021 hal Penatausahaan Rekening Pengeluaran Virtual (VA) Satker. Di dalam surat tersebut, Direktur PKN meminta dukungan K/L untuk mendorong Satker melakukan perekaman rekening pengeluaran virtual pada aplikasi SPRINT.
- Direktur PKN juga telah mengirim nota dinas nomor ND-675/PB.3/2021 hal Perekaman Rekening Induk dan Rekening Satker pada Aplikasi SPRINT kepada Kepala KPPN untuk mendorong Satker melakukan perekaman VA di aplikasi SPRINT

TANTANGAN DAN KENDALA

- Terdapat beberapa K/L yang secara nature hanya menggunakan UP untuk perjadi sehingga belum dapat menggunakan Digipay. Untuk internal Kemenkeu, perlu upaya ekstra untuk bisa mendorong sisa 27 satker segera registrasi.
- Proses SIT dan UAT Fintech/e-Commerce/Lembaga lainnya menjadi LPL membutuhkan waktu yang lama karena memerlukan respon/koordinasi antar Tim IT secara online melalui Whatsap Group antara calon LPL yang bersangkutan dan Tim Ditjen Perbendaharaan (Dit. PKN, Dit. SITP, dan KPPN Khusus Penerimaan) Selain itu juga, dibutuhkan koordinasi teknis formal dan informal terkait pengaturan proses bisnis (SOP) dan kesepakatan secara legalitas dengan calon LPL.
- Dalam hal perekaman rekening pengeluaran di aplikasi SPRINT, tantangannya adalah kesadaran Satker untuk mendaftarkan rekening di aplikasi SPRINT yang belum optimal. Satker perlu didorong untuk melakukan perekaman, baik oleh KPPN maupun oleh K/L.

TINDAK LANJUT

- DJPb telah menyampaikan ND Dirjen Perbendaharaan kepada seluruh K/L terkait penggunaan Digipay dan ND Dir. PKN kepada seluruh es I Kemenkeu sebagai dorongan agar 27 satker Kemenkeu yang tersisa bisa segera melakukan registrasi.
- Pendekatan informal secara langsung melalui Kanwil dan KPPN terus dilakukan untuk melengkapi langkah-langkah formal
- Berkoordinasi dengan K/L untuk menghimbau dan mengingatkan Satker agar merekam rekening pengeluaran di aplikasi SPRINT
- Berkoordinasi dengan KPPN dalam mengingatkan Satker untuk merekam nomor rekening pengeluaran di aplikasi SPRINT



DIGITALISASI
**sistem
pembayaran
pemerintah**

Digitalisasi Sistem Pembayaran Pemerintah

Dit. SITP

KETERANGAN

Januari 2021

- Bank Persepsi telah menyampaikan surat komitmen dan penyesuaian rencana aksi pencapaian target Go Live SP2D Online.
- Telah dilakukan bimtek Digipay kepada satker Kemenkeu di Jakarta, serta ToT untuk KPPN dan Kanwil se-Indonesia.
- E-Commerce DANA dan Fintech Bimasakti sebagai Calon LPL sedang SIT dan UAT.
- Digipay disisi Digit telah selesai dikembangkan Dit SITP.

Februari 2021

- 3 Bank Persepsi (Mandiri, BRI dan BNI) telah menyelesaikan pengembangan Digipay di sisi Client.
- Digipay di sisi Digit telah selesai dilakukan proses VT oleh Pusintek.
- Digipay di sisi Digit telah selesai dilakukan proses deployment di server Production.

KETERANGAN

Maret 2021

- 3 Bank Persepsi (Mandiri, BRI dan BNI) telah menyelesaikan Proses SIT dan UAT bersama dengan tim SITP.
- 2 Bank Persepsi (Mandiri dan BNI) telah didaftarkan di Digipay Production (Digit).

April 2021

- Dari 4 Bank Himbara hanya BTN yang belum menyelesaikan proses SIT dan UAT.
- Mandiri telah melakukan go live, dan akan disusul oleh BRI dan BNI.

Mei 2021 : BTN belum selesai proses SIT dan UAT serta proses deploymentnya.

Juni :

Progres masing-masing Bank :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1.Mandiri : sudah go live | 3.BNI : persiapan piloting |
| 2.BRI : piloting menuju go live | 4. BTN : selesai UAT |

Juli :

Proses Delpoyement lading page Digipay dari sudah selesai dilakukan

TANTANGAN DAN KENDALA

TINDAK LANJUT



DIGITALISASI
**sistem
pembayaran
pemerintah**

Digitalisasi Pembiayaan UMi

Tujuan

Mengimplementasikan *piloting* digitalisasi UMi untuk memanfaatkan *marketplace online* dan transaksi secara *cashless* dalam rangka meningkatkan daya saing debitur

Acceptance Criteria

- Implementasi Digitalisasi Pembiayaan UMi secara *piloting*
- Kajian atas implementasi Digitalisasi Pembiayaan UMi

Dampak/Stakeholder

Kementerian Keuangan, Penyalur dan Lembaga Linkage Pembiayaan UMi, Debitur Pembiayaan UMi, PJSP Uang Elektronik, *Marketplace Online*

Pengertian

Digitalisasi UMi terkait dengan *marketplace online* dan transaksi UMi melalui *cashless*. Dalam mendorong UMi untuk masuk dalam *marketplace online* dengan memanfaatkan platform Digitalisasi UMKM dalam transaksi belanja pemerintah melalui platform pada Direktorat PKN, maupun *marketplace online* yang telah ada saat ini seperti Bukapalapak, Gojek dan lain sebagainya



Keterkaitan IS/IKU

- IS #17 “Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital”
- IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah (Kemenkeu-Wide Tahun 2021)

Unit in Charge

Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya, Dit. SMI dan Satker BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Digitalisasi Pembiayaan UMi

Keterangan

Kegiatan Bulan Desember 2021

1. Telah dilaksanakan penyusunan kajian implementasi Digitalisasi Pembiayaan UMi sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi program untuk menemukan kendala dan/atau peningkatan kualitas program di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan pada Debitur Pembiayaan UMi peserta program dan Debitur Pembiayaan UMi non-peserta program sebagai data pembandingan, ditemukan bahwa:
 1. Pemanfaatan Uang Elektronik: belum siapnya ekosistem pembayaran cashless sehingga motivasi Debitur tidak terlalu tinggi untuk pemanfaatan uang elektronik karena dirasa merepotkan ketika harus bertransaksi tunai ketika ingin belanja. Pemanfaatan Uang Elektronik mayoritas untuk membeli pulsa dan token listrik, hal ini membutuhkan justifikasi lebih lanjut terkait kesesuaian penggunaan Pembiayaan UMi untuk kegiatan usaha
 2. Pemanfaatan Marketplace: secara umum, marketplace online lebih familiar di mata Debitur Pembiayaan UMi, namun dalam pemanfaatannya, Debitur terkendala terkait penyediaan barang dagangan secara ready stock serta manajemen online store yang merepotkan

Tantangan dan Kendala

Secara umum, pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi tidak menemui kendala yang berarti mengingat pada saat pelaksanaan Monev, tim tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Debitur yang menjadi responden juga cukup kooperatif sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari pelaksanaan monev.

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil kajian Monev, dihasilkan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Penguatan Ekosistem Pembiayaan UMi Digital melalui akuisisi merchant yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur Pembiayaan UMi agar pemanfaatan Pembiayaan UMi benar-benar untuk usaha.
2. Perluasan cakupan dan format pelatihan terkait Digitalisasi Pembiayaan UMi dengan mulai merambah format video agar bisa diunggah ke media sosial dan dapat diikuti oleh Debitur menyesuaikan dengan keuangan waktu masing-masing.
3. Diperlukan sinergi antara BLU PIP dengan stakeholder terkait untuk mengembangkan Digitalisasi Pembiayaan UMi.

Hasil Kajian tersebut telah dilaporkan kepada Direktur SMI melalui Nota Dinas Nomor ND-1117/PB.46/2021 tanggal 10 Desember 2021 serta telah disampaikan kepada Dirut PIP melalui Nota Dinas Nomor ND-1414/PB.4/2021 tanggal 24 Desember 2021.

100 %



No	Kegiatan	Target Waktu	Progres	Bobot
1.	Koordinasi dan Pembahasan Peluang UMi Goes Online dengan pelaku marketplace online	Jan - Feb	100%	5%
2.	Sosialisasi Digitalisasi Pembiayaan UMi kepada Koperasi dan Debitur terkait Penyaluran Pembiayaan UMi secara cashless dan pemanfaatan marketplace online	Feb – Mei	100%	15%
3.	Supervisi pelaksanaan Evaluasi terhadap proposal Penyalur dan Pelaksanaan PKS terkait Penyaluran Pembiayaan UMi secara cashless	Mar - Agst	100%	10%
4.	Pemantauan pelaksanaan kerja sama dan progress Debitur UMi dalam memanfaatkan marketplace online	Mar - Jun	100%	10%
5.	Implementasi Penyaluran Pembiayaan UMi secara Cashless dan UMi Goes Online secara Piloting	Mei - Des	100%	30%
6.	Monitoring dan Evaluasi implementasi Digitalisasi Pembiayaan UMi	Sep - Nov	100%	20%
7.	Kajian atas Implementasi Digitalisasi Pembiayaan UMi	Des	100%	10%



Go Live Investasi Pemerintah (Tahap 1)

Unit in Charge

Subdit. BUMN, Subdit. IPB, Subdit. PPKRI, Subdit. KIHK, Subdit. KPIL, Subdit. Hukum; Dit. SMI dan KPPN Khusus Investasi

Keterkaitan IS/IKU

- IS #16 “Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara”
 - IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah (Kemenkeu-Wide Tahun 2021)

Acceptance Criteria

- Pembentukan Infrastruktur Investasi Pemerintah (Sekretariat, Satker KIP beserta anggota komite, Penunjukan OIP)
- Dokumen Investasi Pemerintah (KURS IP, PKIP, Perjanjian Investasi)
 - Go Live-nya Investasi Pemerintah

Pengertian

- Pada tahun 2020, PMK 53/2020 sebagai peraturan teknis pelaksanaan PP 63/2019 telah ditetapkan dan telah dilaksanakan pula sosialisasi secara berkala tentang Investasi Pemerintah kepada para *stakeholders*
- Tahun 2021 merupakan tahap pertama dari implementasi PP 63/2019 dan PMK 53/2020 yang akan dimulai dengan pembentukan infrastruktur Investasi Pemerintah
- Pada Tahun 2022 direncanakan telah terbentuk ekosistem Investasi Pemerintah yang semakin berkembang dan mampu mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia

Tujuan

Implementasi Investasi Pemerintah sesuai dengan tata Kelola yang diatur dalam PP 63/2019 dan PMK 53/2020

Dampak/Stakeholder

Kementerian Keuangan/BUMN dan BUMD/Pemda/Kementerian Lainnya/BLU lainnya



Go Live Investasi Pemerintah (Tahap 1)

No	Kegiatan	Target Waktu (Revisi)	Progres	Bobot
1.	Penyampaian paparan implementasi Investasi Pemerintah sesuai PP/63/2019 dan PMK 53/2020 kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan untuk mendapatkan izin prinsip penetapan Satker KIP	Jan - Jul	100%	10%
2.	Pengusulan Alokasi Anggaran Investasi Pemerintah Non Permanen dan Operasionalisasi KIP Tahun 2021	Jan - Jul	100%	13%
3.	Penetapan Keanggotaan KIP, Sekretariat KIP, Unit Kerja Pembantu (UKP), dan Penyiapan SDM	Feb - Jul	100%	14%
4.	Kebijakan Umum dan Rencana Strategis (KURS) dan Penyiapan Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN)	Jul - Agt	100%	15%
5.	Penunjukan Operator Investasi Pemerintah (OIP), Penyusunan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP) dan Penyusunan Perjanjian Investasi Pemerintah	Jul - Sep	100%	15%
6.	Penetapan infrastruktur pendukung pelaksanaan Investasi Pemerintah non Permanen sesuai mekanisme APBN (penetapan KPA, DIPA dan Pencairan Dana Investasi)	Sep - Des	100%	8%
7.	Pengembangan <i>Blueprint IT</i> Terintegrasi dan SDM	Jun - Des	100%	15%
8.	Telah ada OIP yang melaksanakan Investasi Pemerintah (<i>Go Live</i>)	Jul - Des	100%	10%

100 %

Go Live
Investasi Pemerintah

Direktorat Sistem Manajemen Investasi

1. Penetapan anggota UKP melalui Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-314/PB/2021 Tentang Pembentukan dan Penetapan Unit Kerja Pembantu Komite Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

2. Penunjukkan BP Tapera sebagai OIP melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-1100/MK.05/2021 tanggal 6 Desember 2021.

3. Penandatanganan Perjanjian Investasi oleh Kementerian Keuangan dengan BP Tapera dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021. (Perjanjian Investasi Nomor PI-01/DSMI/2021 dan Nomor 4/PKS/BP-TPR/1/12/2021).

4. Penetapan PKIP BP Tapera melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2021 tanggal 6 Desember 2021.

5. Penetapan KURS IP Tahun 2021-2024 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.05/2021 Tanggal 6 Desember 2021.

7. Blueprint Pengembangan Sistem Informasi PP 63/2019 use case Investasi Pemerintah pada BP Tapera telah selesai disusun dan telah disampaikan ke Direktur SMI dan Kerangka Acuan Kerja Penyediaan Analisis EA dan Sistem Informasi dlm rangka implementasi investasi telah selesai disusun.

6. Pelaksanaan pengalihan dana FLPP dari BLU PPDPP kepada BP Tapera sebagaimana tercantum dalam BAST Nomor 2250/BAST-Pg.KPA/2021 dan BAST-07/PB.4/2021 yang merupakan puncak dari go live- nya Investasi Pemerintah berdasarkan PP 63/2019.

8. Penetapan Pedoman Pelaksanaan Tugas Komite Investasi Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/PMK.05/2021 tanggal 6 Desember 2021.

Go Live Investasi Pemerintah (Tahap 1)



Tantangan dan Kendala

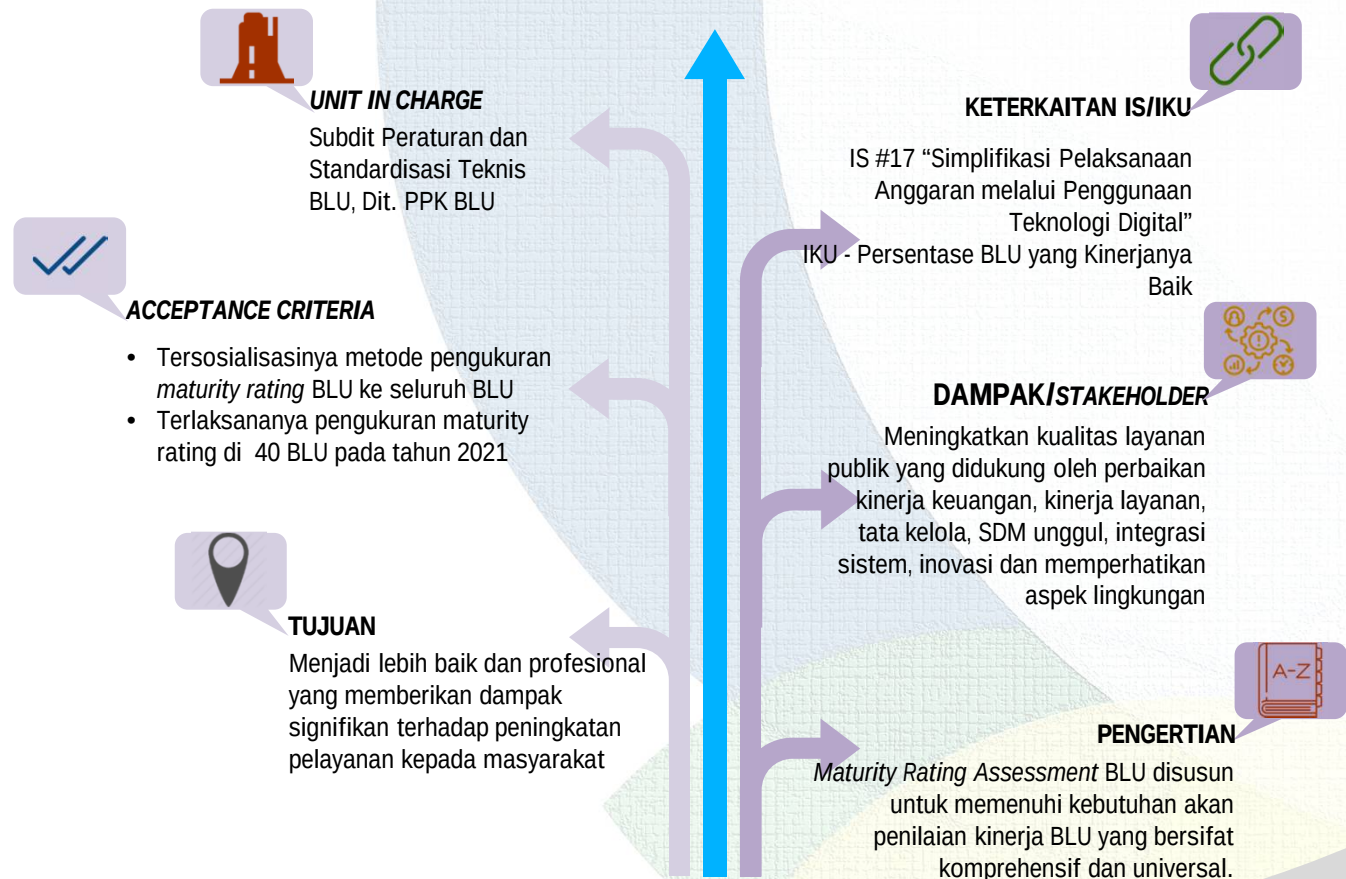
Tindak Lanjut



BLU Maturity Rating Assessment



**BLU MATURITY
RATING**



BLU Maturity Rating Assessment



BLU MATURITY
RATING

100 %

Keterangan

- Regulasi dan Manual Pelaksanaan BLU Maturity Rating Assessment telah selesai disusun dan draft telah disampaikan kepada Direktorat SP untuk proses harmonisasi yang selanjutnya akan disampaikan ke Bagian OTL Sekretariat Ditjen untuk proses penetapan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- Implementasi *Maturity Rating* sampai dengan bulan September 2021 telah dilaksanakan sebanyak 45 BLU bersamaan dengan Monev *online* dan *on-site*.
- Adapun aktivitas yang akan didanai melalui hibah di antara lain jasa konsultansi/asistensi untuk mem-validasi hasil *self-assessment* BLU *maturity rating*.

Tantangan dan Kendala

- Kebijakan PPKM menghambat pelaksanaan BLU *maturity rating* dalam pelaksanaan monev;
- Terdapat hal-hal yang berkembang pada saat piloting yang perlu diakomodir dalam Perdirjen antara lain mitigasi kriteria indikator pada aspek penilaian berbasis proses yang sangat dinamis dan beragam.

Tindak Lanjut

- Membuat forum internal Dit. PPK BLU untuk menampung masukan dan kendala dalam penerapan *self-assessment* BLU *maturity rating*.
- Menyiapkan dokumen-dokumen kelengkapan pengadaan jasa konsultansi yang dibiayai dengan hibah World Bank.
- Berkoordinasi dengan Setditjen, Dit. SITP, dan Setjen terkait proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai hibah World Bank.

Kegiatan	Target	Progres	Bobot
Internal Capacity Building	Jan – Feb	100%	10%
Regulasi Peraturan dan Manual Pelaksanaan BLU <i>Maturity Rating Assessment</i>	Jan – Sep	100%	30%
Sosialisasi dan Diseminasi kepada BLU	Mar – Apr	100%	10%
Implementasi Maturity Rating ke 40 BLU	Mei – Nov	100%	50%

BIOS NextGen: Maturity Rating BLU



Pengertian

Modul *Maturity Rating* BLU pada BIOS-G2 sebagai sarana untuk *Self Assesment Maturity Rating* yang dapat dilakukan oleh BLU secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan akan penilaian kinerja BLU

Dampak/Stakeholder

Simplifikasi dan digitalisasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang didukung oleh perbaikan kinerja keuangan, kinerja layanan, tatakelola, SDM unggul, integrasi sistem, inovasi dan memperhatikan aspek lingkungan

Keterkaitan IS/ IKU

IS #17 "Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital"
IKU - Persentase BLU yang Kinerjanya Baik

Tujuan

Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan bahwa BLU diharapkan dapat menjadi agency atau unit-unit yang mampu menjalankan misinya secara *good governance*, efektivitas dan manfaatnya dirasakan masyarakat, pelayanannya nyata, kinerjanya terekam dan terus diperbaiki

Acceptance Criteria

Tersedianya Modul *Maturity Rating* pada aplikasi BIOS G-2.2

Unit in Charge

Subdit Tarif, Remunerasi dan Informasi BLU, Dit. PPK BLU & Dit. SITP (*Joint QW*)

BIOS NextGen: Maturity Rating BLU

CAPAIAN

100%



Dit. PPK BLU (100%)

Kegiatan	Target	Progres	Bobot
Pembahasan proses bisnis Modul Maturity Rating BLU Aplikasi BIOS	Jan – Feb	100%	20%
Penyusunan dan Pembahasan internal Dokumen Kebutuhan Pengguna	Jan – Feb	100%	30%
Penyampaian dan Pembahasan Dokumen Kebutuhan Pengguna dengan Tim Pengembang	Jan – Feb	100%	20%
Tahap 1: Pengembangan SubModul Penyampaian Dokumen Maturity Rating BLU			
Kegiatan User Acceptance Test	September	100%	10%
Tahap 2: Pengembangan SubModul Penilaian Maturity Rating BLU			
Refreshment pembahasan dokumen kebutuhan pengguna	Agustus	100%	10%
Kegiatan User Acceptance Test	November	100%	10%

Dit. SITP (100%)

No	Timeline Kegiatan	Target 2021	Progr ess	Bobot
1.	Penyampaian dan Pembahasan Dokumen Kebutuhan Pengguna dengan Tim Pengembang Dit. SITP	Jan - Mar	100%	10%
2.	Pengembangan Modul Maturity Rating BLU (Proses Base)	Mar - Apr	100%	10%
3.	Penyusunan Dokumen UAT	Mei	100%	10%
4.	Kegiatan User Acceptance Test	Mei	100%	10%
5.	Quality Assurance ke Pusintek Kemenkau	Nov	100%	5%
6.	Hosting	Des	100%	5%
7.	Refreshment pembahasan dokumen kebutuhan pengguna	Jun	100%	10%
8.	Pengembangan Modul Maturity Rating BLU (Result Base)	Jun - Jul	100%	10%
9.	Penyusunan Dokumen UAT	Agu	100%	10%
10.	Kegiatan User Acceptance Test	Agu	100%	10%
11.	Quality Assurance ke Pusintek Kemenkau	Nov	100%	5%
12.	Hosting	Des	100%	5%

BIOS NextGen: Maturity Rating BLU



Dit. PPK BLU

Keterangan

- Maturity Rating BLU merupakan mekanisme penilaian tingkat kedewasaan pengelolaan BLU, dengan aspek penilaian berdasarkan kinerja (Performance Based) dan dokumen (Process Based).
- Sudah dilaksanakan Quality Assurance oleh Pusintek pada tanggal 6 s.d. 9 Desember 2021
- Hosting di Pusintek sudah dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021

Tantangan dan Kendala

Tindak Lanjut

BIOS NextGen: Maturity Rating BLU



Dit. SITP

Keterangan

Juli 2021 :

- Proses UAT perubahan modul Profil dan Layanan pada Aplikasi BIOS.
- Proses pengembangan modul Maturity Rating pada Aplikasi BIOS (Pembuatan Indikator).

Agustus :

Pengembangan 4 dari 6 sub modul sudah

September :

Masih dilakukan perbaikan pada tahap pengembangan sesuai dengan hasil diskusi dengan pemilik proses bisnis. Setelah pengembangan selesai akan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen UAT dan Pelaksanaan UAT

Oktober :

Proses akhir pengembangan sebelum dilakukan UAT kepada satker, dan penyusunan skenario UAT yang akan dilakukan

November :

Proses UAT telah dan Quality assurance ke Pusintek selesai dilakukan

Tantangan dan Kendala

Tindak Lanjut

Tahap akhir yang akan dilakukan adalah proses hosting yang akan dilakukan di awal Desember 2021

Otomatisasi Telaah Laporan Keuangan

PENGERTIAN

Analisis laporan keuangan dilakukan secara terbatas berupa analisis vertikal dan analisis horizontal secara OTOMATIS dan SISTEMATIS melalui fitur telaah yang diintegrasikan pada aplikasi Laporan Keuangan (Modul GL SPAN dan e-Rekon&LK)

Dampak/Stakeholder

Seluruh satker (UAKPA)/KPPN (UAKBUN-D), UAPPAW/Kanwil DJPb (UAKBUN-W), UAPPA-E1/UAKBUN-P, hingga KL (UAPA)/UAKBUN sebagai *user*, Direktorat APK sebagai Admin *User*, Direktorat SITP sebagai pengembang aplikasi

Keterkaitan IS/IKU

Mendukung IS #19
Mendukung IKU Kemenkeu *One* dan *Kemenkeu Two* yakni persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti



OTOMATISASI
TELAAH LAPORAN KEUANGAN

TUJUAN

- Melakukan otomatisasi telaah laporan keuangan (analisis vertikal, analisis horizontal, analisis hubungan antar akun)
- Memudahkan dan mempercepat pelaksanaan telaah
- Melengkapi fungsi Modul Pelaporan SPAN dan Aplikasi e-Rekon&LK

Acceptance Criteria

- Tersedianya Menu/Fitur Analisis Laporan Keuangan secara terintegrasi pada aplikasi SPAN dan aplikasi eRekon&LK
- Tersedianya *Output* Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan dari Aplikasi SPAN dan aplikasi eRekon&LK

Unit in Charge

Subdit. APPKBUN dan BAIBUN, Dit. APK & SITP (*Joint QW*)

Otomatisasi Telaah Laporan Keuangan

Dit. APK (100%)

Kegiatan	Target	Progres	Bobot
Pembahasan internal (Dit APK)	Jan – Feb	100%	5%
Uji coba <i>prototype</i> Aplikasi Analisis Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (LK Kuasa BUN)	Feb – Mar	100%	15%
Pengajuan <i>User Requirement</i> (UR) – Analisis Horizontal dan Analisis Vertikal ke Dit SITP	Apr – Mei	100%	10%
Pembahasan UR dengan Dit SITP	Apr – Mei	100%	15%
Pengembangan Fitur Otomatisasi Telaah Lk pada Aplikasi e-Rekon&LK oleh Dit SITP	Apr – Jun	100%	25%
Kegiatan <i>User Acceptance Test</i> (UAT) dan finalisasi pengembangan Fitur Otomatisasi Telaah LK	Jun – Agt	100%	25%
Rilis Fitur Otomatisasi Telaah LK pada Aplikasi e-Rekon&LK	Sep– Nov	100%	5%
Total			100%

CAPAIAN

100%



OTOMATISASI
TELAH LAPORAN KEUANGAN

Dit. SITP (100%)

Timeline Kegiatan (Telaah LKKL)	Target	Progress	Bobot
Konfirmasi dan finalisasi UR dengan Dit. APK	Feb – Mar	100%	10%
Penyiapan <i>database</i> dan OLAP e-Rekon&LK	Mar – Apr	100%	20%
Pengembangan fitur otomatisasi Telaah LKKL pada e-Rekon&LK	Apr – Mei	100%	25%
Pelaksanaan UAT aplikasi e-Rekon&LK	Jun – Jul	100%	20%
Perbaikan atas hasil UAT dan finalisasi aplikasi e-Rekon&LK	Jul – Agt	100%	20%
Rilis fitur Otomatisasi Telaah LKKL pada aplikasi e-Rekon&LK	Sep–Nov	100%	5%
Total			100%

Otomatisasi Telaah Laporan Keuangan

Dit. APK

Keterangan

September - Oktober
November

Telah dilakukan koordinasi akhir dengan SITP serta penyusunan Pedoman Penggunaan Menu Otomatisasi Telaah Laporan Keuangan terintegrasi Aplikasi e-Rekon&LK

Desember

Telah diterbitkan nota dinas No. ND-148/PB.63/2021 tanggal 4 Desember 2021 hal Permintaan Rilis Menu Telaah LK pada Aplikasi e-Rekon&LK
Telah diterbitkan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 167/PB.6/2021 tanggal 7 Desember 2021 hal Rilis Menu Telaah LK pada Aplikasi e-Rekon&LK Dalam Rangka Penyusunan LKKL

Tantangan dan Kendala

Tindak Lanjut



Dit. SITP

Keterangan:

Juni :

- Pengujian dilakukan atas raw data yang dihasilkan oleh OLAP e-Rekon.
- Masih menggunakan data tahun anggaran 2020.

Juli :

- Masih dilakukan pengujian atas raw data.
- Perbaikan template jasper report.

Agustus :

- Internal Test* dan UAT telah selesai dilakukan
- Sedangkan proses perbaikan atas hasil internal test dan UAT tersebut, masih berlangsung

September :

Masih dilakukan perbaikan atas temuan hasil UAT. Temuan meliputi kesalahan query pada proses analisa antar laporan serta perbaikan jasper report untuk elemen telaah yang dilakukan secara manual (dikosongkan saja).

Oktober

perbaikan atas temuan hasil UAT telah selesai dilakukan dan proses pengembangan telah selesai dilakukan . fitur Otomatisasi Telaah LKKL juga sudah terdapat pada aplikasi e-Rekon&LK

Tantangan dan Kendala

Tindak Lanjut

Electronic Bank Guarantee (e-BG) Fase I

Pengertian

Mekanisme konfirmasi validitas Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran melalui sistem yang terhubung antara SAKTI dan Perbankan

Tujuan

Menghindari Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang tidak sah/tidak diakui perbankan melalui konfirmasi validitas secara sistem

Dampak/Stakeholder

Satker merasa aman dalam pembayaran sebelum barang/jasa diterima karena dijamin dengan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah dikonfirmasi secara sistem

Acceptance Criteria

Piloting implementasi konfirmasi validitas Garansi Bank minimal pada 1 (satu) bank untuk pembayaran pada akhir Tahun Anggaran 2021.

Keterkaitan IS/IKU

IS #17 "Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital"

Unit in Charge

Subdirektorat HPP Dit. SP dan Dit. SITP (Joint QW)



Electronic Bank Guarantee (e-BG) Fase I

CAPAIAN

100%



Dit. SP (100%)

Kegiatan	Target	Progres	Bobot
Pembahasan konsep komunikasi data BG dengan Perbankan dan Dit. SITP	Jan – Mar	100%	20%
Penyusunan dan penyampaian UR komunikasi data BG	Apr – Mei	100%	15%
Asistensi penyempurnaan aplikasi terkait komunikasi data BG	Jun – Agt	100%	20%
Penyusunan Peraturan Konfirmasi keabsahan bank garansi	Jun – Nov	100%	20%
QA dan UAT	Nov	100%	10%
Sosialisasi Implementasi BG bersama Dit. SITP	Des	100%	5%
Evaluasi dan Monitoring Implementasi BG	Des	100%	10%

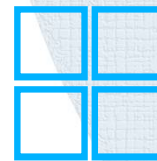
Dit. SITP (100%)

No.	Timeline Kegiatan	Target 2021	Progress	Bobot
1.	Pembahasan komunikasi data BG dengan Perbankan dan Dit. SP	Januari – Maret	100%	15%
2.	Asistensi penyusunan User Requirement BG	April – Mei	100%	10%
3.	Analisis dan Desain BG	Mei	100%	10%
4.	Pengembangan Interkoneksi BG	Juni – Agustus	100%	10%
5.	Unit Test dan Integration Test BG	September	100%	20%
6.	Persiapan UAT BG	Oktober	100%	5%
7.	User Acceptance Test BG	November	100%	10%
8.	Deployment BG	November	100%	5%
9.	Sosialisasi Implementasi BG bersama Dit. SP	Desember	100%	5%
10.	Evaluasi dan Monitoring Implementasi BG	Desember	100%	10%

Electronic Bank Guarantee (e-BG) Fase I

Keterangan

- Pembahasan konsep komunikasi data, penyusunan dan penyampaian UR, dan asistensi penyempurnaan aplikasi telah selesai dan dilaporkan pada laporan Quickwins periode sebelumnya.
- Capaian penyusunan peraturan sebesar 100%
- UAT telah selesai dilaksanakan sehingga capaian 100 %
- Sosialisasi implementasi BG telah dilakukan pada Desember 2021.
- Monitoring dan Evaluasi implementasi BG telah dilakukan pada minggu terakhir di Desember 2021.



Dit. SP

Tindak Lanjut

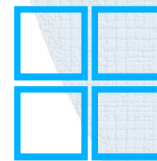
- Mendorong penyelesaian pengembangan sistem di perbankan sesuai deadline yang telah ditetapkan.
- Melakukan sosialisasi dan monev implementasi BG pada akhir tahun.

Tantangan dan Kendala

- Kebutuhan pengaturan/regulasi dalam rangka penanganan Covid-19 sehingga adanya perubahan konsentrasi pada pengerjaan. Efeknya ke belakang beberapa program juga mengalami keterlambatan.
- Terdapat beberapa perbaikan dalam sistem perbankan yang mengakibatkan beberapa perubahan proses bisnis.
- Penyusunan regulasi/peraturan sangat berkaitan dengan pengembangan aplikasi

Electronic Bank Guarantee (e-BG) Fase I

Keterangan:
Pembahasan konsep komunikasi data, asistensi penyusunan UR, analisis dan design BG, dan interkoneksi sistem telah selesai dan dilaporkan pada laporan Quickwins periode sebelumnya. Capaian UT dan SIT sebesar 100% dengan perhitungan telah dilakukan UT dan SIT untuk BNI, BRI, dan Bank Mandiri.



Dit. SITP

Tantangan kendala :

- Terdapat pengembangan yang merupakan sequence, sehingga harus menunggu satu proses selesai terlebih dahulu baru dapat dilakukan pengembangan.
- Pengembangan bukan hanya di sistem internal DJPb namun juga pengembangan sistem utama di bank.
- Perbedaan pengembangan sistem di bank (in house, hybrid, dan pihak ketiga)
- Koordinasi dengan bank harus dilakukan secara parsial per bank

Tindak lanjut

- Koordinasi intensif dengan pengembang IT bank untuk pelaksanaan UAT.
- Mendorong penyelesaian pengembangan sistem di bank sesuai deadline yang telah ditetapkan

Rancangan Treasury Big Data



Unit in Charge

Subdit PTTI, Subdit PSII, Subdit PSIE, Subdit PPSI, Subdit PI

Keterkaitan IS/IKU

IS Data Analytic Perbendaharaan

Acceptance Criteria

Rancangan Treasury Big Data sebagai acuan pengembangan Treasury Big Data menyeluruh untuk mendukung pengambilan keputusan strategis DJPb, memenuhi kebutuhan stakeholders akan analisis data dan informasi

Pengertian

Treasury Big Data merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia

Tujuan

Treasury Big Data bertujuan agar data yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan, baik yang terstruktur maupun tidak, dapat secara efektif diproses untuk menghasilkan pemahaman berdasarkan analisis data untuk mendasari keputusan strategis dan memenuhi kebutuhan informasi.

Dampak/Stakeholder

Treasury Big Data akan menjadi teknologi yg mendasari pengambilan keputusan strategis pimpinan DJPb di area pelaksanaan anggaran, perencanaan kas, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, manajemen investasi, hingga pelaporan keuangan & penyediaan informasi perbendaharaan berdasarkan data yang dimiliki dari berbagai sumber, yang berdampak ke masyarakat umum

Rancangan Treasury Big Data

Keterangan

November 2021:

Laporan akhir rancangan Treasury Big Data sudah selesai dilakukan perbaikan dan dokumen final sudah disampaikan oleh pihak ketiga/vendor kepada Direktorat SITP.



Tantangan dan Kendala



Tindak Lanjut



**Treasury
BIGdata**

100 %

No	Timeline Kegiatan	Target 2021	Progres	Bobot
1.	Pembahasan awal internal SITP	Februari - Maret	100%	5%
2.	Pembahasan awal dengan Direktorat teknis (kerangka kerja)	April	100%	5%
3.	Assessment kebutuhan bisnis	Mei	100%	15%
4.	Assessment kebutuhan teknis	Juli	100%	15%
5.	Perancangan	Agustus - Oktober	100%	30%
6.	Dokumentasi rancangan	Oktober	100%	10%
7.	Sosialisasi rancangan dan perbaikan	November	100%	10%
8.	Dokumen final	November	100%	10%

Terima kasih

